

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, yang tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah, apabila diminta.

Pengadilan Agama Pasuruan pertama kali berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai Ketua pertama adalah KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang. Pengadilan yang sekarang beralamat di JL. Ir. H. Juanda No.11 A Pasuruan ini, pada tahun 2011 memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Ketua	:	Drs. H. Sugito Musman, SH
Wakil ketua	:	Drs. H. Muhajir, SH
Panitera / Sekretaris	:	Drs. Kusnadi
Wakil Panitera	:	Agus Samsul Huda, SH
Panmud Permohonan	:	Drs. Yumroni
Panmud Gugatan	:	H. Irdariyah, SH
Panmud Hukum	:	Drs. A Dardiri
Wakil Sekretaris	:	Drs. Nidzom Anshori, SH
Kaur Kepegawaian	:	Dimas Wahyu A, SE
Kaur Keuangan	:	Mochamad Rodien
Kaur Umum	:	Samsul Hadi
Hakim	:	Mashuri, SH
		Drs. H. Asmu'in
		Drs. Akhmad Khoiron
		Drs. Zainal Arifin, MH
		Drs. H. Abdul Kholik
		Musthofa, SH, MH
		Slamet, S.Ag, SH
		Drs. H. Ach Shofwan, SH
Panitera Pengganti	:	Drs. M. Mulyani
Juru Sita	:	Drs. A Dardiri
		Drs. Yumroni
		Drs. Nidzom Anshori, SH
		Samsul Hadi
		Mochamad Rodien
		Dimas Wahyu Adrianto, SE
		Imam Wahyudi, SE

Visi Pengadilan Agama Pasuruan adalah Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang Agung. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan¹

Pada tahun 2011, Pengadilan Agama Pasuruan menerima kasus dengan jumlah rata-rata 132 kasus perbulan. Total kasus yang masuk ke Pengadilan

¹ www.pa-pasuruan.web.id diakses pada tanggal 08 Maret 2012.

Agama Pasuruan pada tahun 2011 adalah 1578, yang mana 1563 diantara berhasil diselesaikan dan diputuskan. Pada tahun 2012, hingga bulan Februari telah tercatat sebanyak 369 kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Pasuruan.²

Kebijakan Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, juga turut dijalankan oleh Pengadilan Agama Pasuruan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya sidang keliling sebagai salah satu bentuk bantuan hukum pada masyarakat terutama yang berada di pelosok yang masih termasuk dalam lingkup yurisdiksinya.

Menurut Nidzom, sidang keliling pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan salah satunya di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan pada tanggal 27 Mei 2011.

“Salah satu sidang keliling yang kita laksanakan, salah satunya di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Itu kalau tidak salah sekitar bulan Mei tahun 2011. Nanti saya kasih dokumentasinya.”³

B. Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Pasuruan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama mendefinisikan sidang keliling yang merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan

² www.pa-pasuruan.web.id/StatistikPerkaraPengadilan_AgamaPasuruan.html. diakses pada tanggal 08 Maret 2012 .

³ Nidzom Anshori, SH. Wawancara tanggal : 2 Februari 2012.

pengadilan.⁴ Dengan kata lain, sidang keliling adalah proses persidangan dalam upaya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dilakukan di lokasi yang jauh dari Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama, baik sidang tersebut secara tetap (berkala), ataupun sewaktu-waktu saja.

Definisi serupa disampaikan oleh seorang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang bernama Akhmad Khoiron berkata :

“Sidang keliling adalah Sidang yang dilakukan diluar tempat yang semestinya (Pengadilan Agama Pasuruan), tapi masih dalam yuridiksi Pengadilan Agama Pasuruan.”⁵

Definisi seperti demikian menegaskan bahwa sidang keliling merupakan sebuah persidangan khusus yang dilakukan di luar tempat persidangan pada umumnya. Berdasarkan definisi yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama ataupun yang disampaikan Akhmad Khoiron di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam segi hukum beracara antara persidangan biasa dengan sidang keliling. Hal ini karena kekhususan dan perbedaanya hanya terletak pada tempat dimana sidang tersebut dilaksanakan.

Berbicara masalah hukum beracara yang digunakan dalam sidang keliling, Akhmad Khoiron mengatakan :

“Hukum acara dalam pelaksanaan sidang keliling itu sama seperti sidang yang dilakukan di Pengadilan agama. Prosesnya sama, tata caranya sama, eksekusinya juga sama. Yang berbeda tempat saja.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama, Pasal 1.

⁵ Akhmad Khoiron, Wawancara tanggal : 2 Februari 2012.

Pelaksanaannya sama seperti sidang yang dilaksanakan di pengadilan.”⁶

Pada pernyataannya, Akhmad khoiron tidak menyebutkan dasar hukum yang digunakan sebagai landasan. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama sebagai landasan utama pelaksanaan sidang keliling juga tidak menyebutkan masalah hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan keliling secara eksplisit. Guna mengetahui kebenarannya, tidak ada jalan lain selain dikembalikan pada dasar hukum sidang keliling dan mencari makna yang terkandung dalam setiap substansi hukumnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, pasal 11 menyebutkan :

- (1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor pengadilan Agama.
- (2) Sidang keliling dapat dilaksanakan di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau gedung lainnya.
- (3) Ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

Pasal ini secara khusus membahas masalah pemilihan lokasi dan ruang pelaksanaan sidang keliling dan sama sekali tidak menjelaskan masalah hukum acara yang digunakan dalam pelaksanaan sidang keliling. Akan tetapi, pada pasal 12 menyebutkan :

- (1) Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya oleh satu majelis hakim.

⁶ Akhmad Khoiron, Wawancara . tanggal : 2 Februari 2012.

Pasal 12, terutama ayat (1) di atas menegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan sidang keliling, setidaknya harus terdapat satu majelis hakim. Majelis hakim yang dimaksud terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Hal ini sangat sejalan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 17 ayat (1), yang berbunyi :

“Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Kesamaan ini menandakan bahwa tidak ada perbedaan hukum acara yang digunakan dalam persidangan di pengadilan agama pada umumnya dengan hukum acara yang dilaksanakan secara keliling. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 12 ayat (2), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang berbunyi :

(2) Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan pejabat serta staff Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.

Keikutsertaan hakim mediator dan staff pengadilan lain yang dibutuhkan dalam sidang keliling semakin memperkuat alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan umumnya di pengadilan agama dengan hukum acara sidang keliling.

Pembahasan tentang pasal 11 dan pasal 12, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama ini menjadi rasionalisasi untuk menegaskan bahwa yang disampaikan oleh Akhmad Khoiron sebagai Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang pernah melaksanakan sidang keliling berkaitan dengan hukum

acara yang digunakan dalam sidang keliling adalah benar adanya dan telah sesuai aturan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Kesamaan hukum acara yang digunakan antara sidang pada umumnya di pengadilan agama dengan sidang keliling memunculkan pertanyaan tentang prosesi teknis pelaksanaan sidang keliling, mengingat tempat pelaksanaannya yang jauh dari kantor Pengadilan Agama. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah proses pendaftaran beracara dalam sidang keliling. Berkenaan dengan hal tersebut, Akhmad Khoiron berkata :

“Dalam prosesnya kita bekerjasama dengan aparat kecamatan, perangkat desa, pegawai KUA. Jadi dengan demikian akan mempermudah prosesnya. Misalnya untuk pendaftaran perkara. Perkaranya kan didaftar secara kolektif, jadi harus ada kerja sama dengan KUA, muspika, mudin, kepala desa. ”

Pendaftaran perkara secara kolektif dalam sidang keliling tidak memiliki landasan hukum khusus. Pernyataan di atas sedikit menggambarkan teknis pelaksanaan sidang keliling, terutama pada proses pendaftaran perkaranya. Pendaftaran perkara secara kolektif seperti yang dikatakan Akhmad Khoiron tersebut dapat dilakukan sebagai upaya efisiensi pelaksanaan sidang keliling.

Efisiensi pelaksanaan persidangan, termasuk sidang keliling, adalah merupakan salah satu amanat undang-undang. Efisiensi tersebut secara umum terangkum dalam asas pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang menuntut terwujudnya sikap moderat, artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan, serta tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan.

Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.⁷

Efisiensi sidang keliling secara khusus disebutkan dalam pasal 15 ayat (3), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama, yaitu :

- (3) Sidang keliling harus dijalankan dengan seefektif mungkin dan seefisien mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah perkara dan lokasi sidang keliling.

Jumlah perkara dan jarak tempat pelaksanaan sidang keliling menjadi dua hal yang benar-benar diperhatikan.

Guna menghadapi permasalahan jumlah perkara dan jarak lokasi persidangan tersebut, dibutuhkan sebuah koordinasi dan kerjasama yang erat antara pihak pengadilan dengan berbagai instansi atau perseorangan yang berkaitan dengan proses sidang keliling. Secara khusus, berkaitan dengan hal ini, pasal 15 ayat (3), Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, menegaskan :

- (4) Pimpinan Pengadilan harus proaktif menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelaksanaan sidang keliling menjadi tepat sasaran.

Tepat sasaran yang dimaksud dalam ayat ini difokuskan pada 2 hal, yaitu ketepatan target orang-orang yang beracara dan maksimalisasi proses peradilanannya. Target dan tujuan pelaksanaan sidang keliling tak lain adalah masyarakat pedalaman yang berada di daerah terpencil dapat berperkara dan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan sesuai dengan ketentuan

⁷ Mardani. *Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 51

perundang-undangan yang berlaku. Adapun maksimalisasi proses peradilannya dimaksudkan agar sidang keliling tersebut benar-benar berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan solusi hukum bagi masyarakat yang berperkara di dalamnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat pelaksanaan sidang keliling ini membutuhkan upaya lebih dalam pelaksanaannya ; berbeda dengan sidang biasa yang semua kebutuhan sudah terpenuhi pengadilan.

Adapun masalah sidang keliling yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan, Nidzom menjelaskan :

“Pada waktu itu kita bekerja sama dengan seluruh aparat yang ada di kecamatan dan aparat desa, terutama orang-orang KUA Rejoso. Bahkan untuk tempat kita menggunakan kantor KUA Rejoso sebagai tempat pelaksanaan sidang dan tempat pendaftaran bagi masyarakat yang mau berperkara di sidang keliling tersebut nantinya. Rame yang hadir dan mengikuti persidangan waktu itu..”⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di Rejoso, Pengadilan Agama Pasuruan melakukan kerjasama dengan seluruh aparat baik yang di kecamatan ataupun aparat desa, sehingga masyarakatpun sangat antusias. Antusiasme tersebut sangat tampak dengan adanya penjelasan jumlah perkara yang disidang kelilingkan. Dalam keterangannya, Nidzom melanjutkan :

“Dalam satu kali sidang keliling PA Pasuruan menyidangkan 30 perkara lebih.. yang banyak itu adalah sidang penetapan nikah. Istbat nikah.. kasus perceraian juga ada. Cerai talak, cerai gugut, perbaikan buku nikah tapi kalau waris gak ada.”⁹

Berdasarkan jumlah perkara yang masuk dalam proses pelaksanaan sidang keliling, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Rejoso yang

⁸ Nidzom Anshori, Wawancara, tanggal : 2 Februari 2012.

⁹ Nidzom Anshori, Wawancara, tanggal : 2 Februari 2012.

digagas oleh Pengadilan Agama Pasuruan berlangsung sukses. Adapun perincian perkara yang disidangkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Perkara Sidang Keliling

NO	Jenis Perkara	Jumlah
1	Istbath Nikah	34
2	Perbaikan Buku Nikah	1
3	Cerai Gugat	4

Tentang perkara perceraian yang masuk dan didaftarkan dalam sidang keliling, Akhmad Khoiron mengatakan :

“untuk kasusnya, bermacam. Kasus isbath nikah bisa langsung kita selesaikan dan ditetapkan. Tapi kalau perceraian, gak mungkin diselesaikan dalam satu kali sidang. Jadi untuk kelanjutannya, kasus perceraian kembali ke Pengadilan Agama.”

Keterangan Akhmad Khoiron diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan sidang keliling tidak langsung memberikan putusan terhadap perkara-perkara yang membutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian lama. Seperti yang dicontohkan adalah kasus perceraian. Kasus perceraian yang didaftarkan di sidang keliling pada awalnya akan diproses di sidang keliling tersebut, namun untuk kelanjutannya, pemeriksaan dilanjutkan di Pengadilan Agama sebagaimana perkara-perkara pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pasuruan hanya dilakukan dalam 1 hari dan tidak dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus perceraian dalam 1 kali sidang.

C. Efektifitas Peran Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.¹⁰ Jadi secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling, sebelum lebih jauh menilai efektifitasnya, ada baiknya kita pertimbangkan tingkat kesesuaiannya dengan salah satu asas Pengadilan Agama, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berperkara cepat, sederhana, dan, biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat, biaya ringan diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2). Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 57 ayat (3).

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi, yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini adalah:

¹⁰ <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>

- (1). Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- (2) Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.¹¹

Pembahasan pelaksanaan sidang keliling sangat menarik dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan . Hal tersebut dikarenakan sidang keliling dilakukan di daerah yang jauh dan dengan kondisi yang berbeda dengan situasi dan kondisi pengadilan pada umumnya. Posisi pelaksanaan dan perbedaan situasi dan kondisi tempat pelaksanaan tersebut akan berakibat pada kesiapan pelaksanaannya. Pengadilan agama yang melaksanakan sidang keliling ini harus mempunyai upaya lebih untuk mewujudkan suatu proses persidangan keliling yang tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Asas Sederhana

Wawancara dilakukan dengan Akhmad Khairon

Ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman Asas Sederhana serta penerapannya dalam sidang keliling

“Yang dimaksud asas sederhana yaitu asas yang mengharuskan dalam pelaksanaannya tersebut itu tidak berbelit-belit, jelas, dan lugas guna serta harus efisien untuk memudahkan penyelesaian kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan.

Adapun dalam penerapannya dalam sidang keliling, sebelumnya asas sederhana tidak hanya dipraktekkan dalam sidang keliling namun ketika sidang dilakukan di pengadilan agama pun asas sederhana ini harus dipraktekkan. Dalam sidang keliling penerapan asas sederhana ini secara

¹¹ Mardani. *Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 51.

keseluruhan memang belum bisa diterapkan karena tidak memungkinkannya asas tersebut untuk diterapkan. Misalnya, dalam penyelesaian kasus harta gono gini, sengketa warisan, perceraian. perkara-perkara tersebut tentunya memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya sehingga belum bisa diselesaikan pada sidang keliling saja, yang mengharuskan melakukan persidangan di pengadilan agama. Asas sederhana hanya bisa diterapkan dalam kasus misalnya isbat nikah karena dalam prakteknya isbat nikah bisa diputuskan dalam satu kali sidang.”¹²

Wawancara dilakukan dengan Nidzhom Anshari

“Yang dimaksud asas sederhana yaitu asas yang memudahkan dalam penerapannya jadi tidak dipersulit dalam penyelesaiannya kasus yang dibawa baik ke pengadilan agama maupun dalam sidang keliling. Penerapan asas sederhana dalam sidang keliling hanya bisa praktekkan dari segi administrasi saja akan tetapi dari segi putusannya belum bisa diterapkan karena dalam penyelesaian kasus tertentu membutuhkan waktu yang lama, karena membutuhkan suatu kajian yang komprehensif dalam memutuskan suatu putusan. Hanya saja kami sebagai hakim selalu berupaya untuk mempraktekkan asas sederhana tersebut. dalam prakteknya dalam sidang keliling ketika menangani kasus perceraian misalnya, penerapan asas sederhana ini tentunya sangat sulit untuk diterapkan karena adanya asas mempersulit dalam perceraian, sehingga dalam sidang keliling tentu saja asas tersebut sulit untuk dipraktekkan.”¹³

Wawancara dilakukan dengan Slamet

”Yang dimaksud asas sederhana yaitu tidak mempersulit kepada kasus-kasus yang dibawa ke pengadilan agama maupun sidang keliling baik dalam putusannya maupun dalam administrative. Karena seringkali asas tersebut dilupakan oleh para penegak hukum, sehingga banyak kasus-kasus yang menumpuk di pengadilan agama yang belum terselesaikan. Dalam penerapannya asas tersebut mampu diterapkan oleh kami selaku hakim walaupun masih belum sepenuhnya akan tetapi kami selalu berharap asas sederhana benar-benar mampu diterapkan pada setiap pengadilan tak terkecuali pada sidang keliling. Karena kami sendiri menyadari bahwasanya banyak sekali kasus-kasus yang sudah lama sekali namun belum mendapatkan putusan dari pengadilan. Mungkin ini sebagai pekerjaan rumah bagi kami. Dalam pelaksanaannya pada sidang keliling

¹² Akhmad Khoiron, wawancara (Pasuruan 31 Juli 2012).

¹³ Nidzhom Anshari, wawancara (Pasuruan 31 Juli 2012).

asas sederhana ini kami terapkan pada kasus-kasus yang sekiranya tidak membutuhkan persidangan yang lama seperti isbat nikah, namun dalam kasus yang lain yang membutuhkan beberapa kali persidangan tentunya kami belum bisa menerapkannya, karena tidak sesederhana itu dalam memberikan putusan dalam suatu kasus, namun kami selalu mengupayakannya untuk sesederhana mungkin dalam penyelesaian suatu kasus.”¹⁴

Wawancara dilakukan dengan Khoirul Huda

“Yang saya pahami asas sederhana yaitu dalam penyelesaian kasus sesederhana mungkin jangan dipersulit jangan berbelit-belit. Yang saya ketahui pengadilan agama selalu berbelit-belit dalam penyelesaian kasus yang dibawa ke pengadilan.

Dalam prakteknya ketika sidang keliling saya selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) ketika saya mendampingi masyarakat yang melakukan sidang keliling, hakim ketika menyelesaikan kasus isbat nikah itu langsung membrikan putusan diwaktu itu juga sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, akan tetapi ketika menangani kasus perceraian hakim tidak langsung memberikan putusan. Jadi menurut saya asas sederhana itu tidak berlaku pada seluruh kasus yang ditangani oleh hakim ketika sidang keliling.”¹⁵

Wawancara dilakukan dengan Muhammad Hasan

“Saya sendiri tidak terlalu mengetahui mengenai asas sederhana tetapi kalau tidak salah asas sederhana itu mudah atau gampang itu saja.

Dalam prakteknya ketika yang saya alami ketika saya mengikuti sidang keliling kasus yang saya ajukan ketika itu langsung mendapat putusan dan berlangsung tidak terlalu lama hanya sekitar 20-30 menit. Kasus yang saya ajukan ketika itu penetapan nikah karena ketika saya dulu menikah tidak mempunyai buku akta nikah.”¹⁶

Wawancara dilakukan dengan Abdullah sebagai salah satu anggota masyarakat yang pernah mendaftarkan perkaranya untuk diselesaikan dalam sidang keliling.

“Yang saya ketahui asas sederhana itu tidak ribet tidak dipersulit hanya itu yang saya ketahui.

¹⁴ Slamet, wawancara (Pasuruan, 31 Juli 2012).

¹⁵ Khoirul Huda, wawancara (Rejoso, 28 Juli 2012)

¹⁶ Muhammad Hasan. Wawancara (Rejoso, 28 Juli 2012)

Yang saya alami ketika saya mengikuti sidang keliling saya merasa tidak dipersulit oleh pihak pengadilan mulai saya mendaftarkan perkara hingga putusan perkara. Ketika itu saya mendaftarkan perkara penetapan nikah. Saya tidak perlu lama untuk mendapatkan putusan dari pengadilan sidang keliling hanya sekitar setengah jam. Menurut saya efektif dalam pelaksanaannya.”¹⁷

Pernyataan berbagai pihak tentang azas sederhana dalam pelaksanaan sidang keliling di atas sebenarnya mengarah pada satu hal, yaitu bahwa pada dasarnya sidang keliling diupayakan sesederhana mungkin dengan tanpa menyalahi hukum acara peradilan agama. Hal itupun dapat dikatakan berhasil mengingat adanya penegasan dari anggota masyarakat yang pernah mendaftarkan perkaranya untuk diselesaikan dalam sidang keliling

2. Asas biaya ringan

Ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman asas biaya ringan serta penerapannya dalam sidang keliling

Wawancara dilakukan dengan Akhmad Khairon

“Yang dimaksud dengan asas biaya ringan yaitu dalam mencari keadilan masyarakat hendaknya tidak dipersulit dalam pembiayaan karena karena pihak pengadilan sendiri telah mendapatkan dana dari Negara, kami berharap masyarakat tidak merasa enggan untuk berurusan dengan pengadilan agama disebabkan karena tidak mampu untuk membayar biaya dipengadilan agama.

Asas biaya ringan dalam prakteknya ketika sidang keliling pihak pengadilan berupaya untuk menjemput masyarakat khususnya yang jauh dari pengadilan agama bagi yang berperkara untuk sesegera mungkin ditangani oleh pihak pengadilan agama. Hal ini disebabkan masyarakat yang jauh dari pengadilan agama enggan membawa perkaranya ke pengadilan agama karena membutuhkan banyak biaya.”

Wawancara dilakukan dengan Nidzham Anshari

“Asas biaya ringan yaitu nilai-nilai keadilan yang tidak dimaterialisasikan sehingga para pencari keadilan tidak enggan untuk berperkara ke pengadilan dengan adanya jaminan biaya ringan. Dalam sidang keliling pihak pengadilan berusaha keras untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat yang ingin berperkara dengan mengadakan persidangan yang dilakukan langsung di Desa yang ingin mengajukan perkaranya di pengadilan. Sehingga masyarakat tidak memerlukan biaya untuk transportasi dari Desa masing-masing ke tempat pengadilan.”

Wawancara dilakukan dengan Slamet

“Yang dimaksud asas biaya ringan yaitu bagaimana sidang itu bisa dilakukan dengan biaya murah sehingga tidak memberatkan bagi pihak yang berperkara untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Tidak perlu biaya mahal untuk mencari keadilan. Sidang keliling merupakan salah satu terobosan untuk lebih menekan biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya jauh dari pengadilan agama. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Biasanya masyarakat enggan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan agama karena biaya bolak balik dari rumah ke pengadilan.”

Wawancara dilakukan dengan Khoirul Huda

“Yang saya ketahui tentang asas biaya ringan yaitu ketika kita mengurus perkara ke pengadilan itu murah tidak mahal karena pihak pengadilan agama sendiri telah mempunyai dana yang turun dari Negara. Dalam sidang keliling cukup efektif karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk membawa perkaranya ke pengadilan karena pihak pengadilan sendiri yang menjemput ke masyarakat. Saya sendiri selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) menghimbau untuk lebih sering lagi sidang keliling bukan hanya setahun sekali dikarenakan alasan biaya bolak-balik dari rumah ke pengadilan agama merupakan salah satu factor masyarakat itu enggan berurusan dengan pengadilan agama.”

Wawancara dilakukan dengan Muhammad Hasan

“Yang saya ketahui tentang asas biaya murah yaitu tidak mahal sehingga ketika berperkara tidak terlalu mengeluarkan banyak uang. Yang saya rasakan ketika mengikuti sidang keliling saya merasa murah karena hanya dikenai biaya panjar dari pihak pengadilan agama. Tanpa mengeluarkan biaya untuk transport, karena rumah saya jauh dari tempat

pengadilan agama tentunya ketika saya mengikuti sidang di pengadilan agama akan menghabiskan cukup banyak uang.”

Wawancara dilakukan dengan Abdullah

“Asas biaya murah yaitu tidak dikenakan banyak biaya ketika kita berperkara dipengadilan.

Sidang keliling memberikan saya kemudahan dalam segi biaya ketika saya mengajukan perkara ke pengadilan ini yang saya rasakan. Saya tidak merasa terbebani karena peradilan dilakukan di Desa saya sendiri sehingga tidak jauh-jauh pergi ke pengadilan agama.”

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sidang keliling dalam kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah mengenai biaya pelaksanaan sidang keliling tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Akhmad Khoiron, selaku hakim di Pengadilan Agama Pasurun menjelaskan :

“Untuk dana kita ada 2 macam. Pertama dana yang digunakan untuk operasinal pelaksanaan, yang berkaitan dengan tempat, perlengkapan atau kebutuhan para petugas misalnya. Ya, seperti transportasi, akomodasi dan lain-lain. Ini dibebankan pada dana DIPA. Yang kedua adalah dana yang berkaitan dengan kebutuhan pihak yang akan berperkara. Seperti sidang-sidang biasanya, ini dibebankan pada para pihak yang berperkara.”

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Akhmad Khoiron diatas, dapat diketahui bahwa kalau dilihat dari sisi pihak yang berperkara, tidak ada perbedaan biaya antara sidang pada umumnya dengan biaya sidang keliling. Artinya, orang-orang yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling juga harus melakukan pembayaran biaya perkara. Perbedaan terjadi pada dana yang harus disiapkan oleh pengadilan sendiri. Jika pada sidang biasanya pengadilan tidak menganggarkan dana untuk kebutuhan akomodasi ataupun transportasi para petugasnya, maka pada pelaksanaan sidang keliling ini pengadilan harus mengeluarkan dana yang dianggarkan dari DIPA untuk kebutuhan para petugas di lapangan.

Pernyataan yang disampaikan oleh Akhmad Khoiron tersebut sangat sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama, pasal 13. Pasal tersebut menegaskan :

Pasal 13

Biaya Penyelenggaraan Sidang Keliling

Biaya penyelenggaraan sidang keliling dibebankan kepada DIPA

Pengadilan Agama yang komponennya terdiri dari:

1. Biaya tempat persidangan.
2. Biaya sewa perlengkapan sidang.
3. Biaya Petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Pasal ini menekankan bahwa biaya yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama saja, tidak disebutkan bahwa biaya berpekara pada umumnya juga dibebankan pada DIPA. Namun demikian jika dalam pelaksanaannya terdapat golongan masyarakat tidak mampu yang berkeinginan untuk berperkara di sidang keliling, maka bisa diajukan permohonan pelaksanaan sidangnya secara prodeo. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat (2) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama, yang berbunyi :

2. Sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.¹⁸

Tidak adanya perbedaan biaya perkara bagi pihak yang akan berperkara dalam pengadilan umumnya ataupun sidang keliling dan masih mungkin sidang keliling dilaksanakan secara prodeo, menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pasuruan cukup memberikan keringanan pada pihak yang ingin berperkara. Sebaliknya, pengadilan harus mengeluarkan dana lebih yang dianggarkan dari dana DIPA untuk membiayai kebutuhan teknis pelaksanaan sidang keliling.

Permasalahan dana DIPA yang digunakan untuk sidang keliling, diperoleh penjelasan dari Nidzom, beliau berkata :

“Dalam satu kali pelaksanaan sidang keliling, pengadilan menganggarkan dana sekitar 3,5 juta yang diambilkan dari dana DIPA”

Dana yang dimaksud adalah dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan teknis dari pelaksanaan sidang keliling. Kebutuhan tersebut terkait akomodasi dan transportasi. Termasuk di dalamnya adalah sewa gedung dan peralatan serta kelengkapan persidangan lainnya.

Mengenai efektifitas pelaksanaan sidang keliling secara umum, Akhmad Khoiron mengatakan :

“Kalau masalah efektif atau tidaknya, menurut saya relatif saja.. Cuma, yang saya lihat, pelaksanaan sidang keliling ini

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama..., Pasal. 15.

Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui DIPA pengadilan. Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan syarat tertentu. Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

cukup efektif bagi masyarakat, namun tidak bagi pihak pengadilan. Jadi bagi pengadilan justru kurang efektif...”

Penjelasan dari Akhmad Khoiron tersebut seakan menunjukkan adanya efektifitas yang berbeda dalam pelaksanaan sidang keliling. Penyebutan efektif bagi masyarakat dan kurang efektif bagi pengadilan menunjukkan bahwa hal ini perlu dikaji lebih jauh.

Efektifitas dari suatu hal dapat dilihat dari berbagai macam faktor yang mendasarinya. Dalam pelaksanaan sidang keliling, faktor tersebut bisa berupa biaya, waktu dan jarak.

Permasalahan biaya telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Bahkan, secara langsung Akhmad Khoiron mengatakan bahwa biaya bagi pihak yang akan berperkara dalam sidang keliling tidak berbeda dengan biaya sidang pada umumnya. Perbedaan justru terjadi pada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengadilan untuk melaksanakan sidang keliling tersebut. Dengan demikian, faktor biaya menunjukkan bahwa pernyataan Akhmad Khoiron tentang efektifitas sidang keliling adalah benar.

3. Asas cepat

Ketika peneliti menanyakan tentang pemahaman asas cepat serta penerapannya dalam sidang keliling

Wawancara dilakukan dengan Akhmad Khoiron

“Asas cepat yaitu cepat dalam menangani kasus-kasus yang diajukan oleh pihak yang berperkara di pengadilan agama, akan tetapi tentunya juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun sosiologis.

Asas cepat dalam praktek sidang keliling sebenarnya sama halnya dengan penerapan asas sederhana yaitu hanya bisa diterapkan kasus-kasus tertentu saja. Karena beberapa kasus biasanya ada yang memerlukan

waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terdapat kasus yang cukup dengan satu kali sidang.”

Wawancara dilakukan dengan Nidham Anshari

“Asas cepat yang dimaksud yaitu cepat dalam menangani suatu perkara tapi tetap memerlukan ketelitian dan kecermatan sehingga putusan tersebut benar-benar menjadi putusan yang adil dari kedua belah pihak yang berperkara. Tidak serta mengulur-ulur dalam memproses kasus tersebut.

Dalam praktek sidang keliling asas cepat ini sulit untuk diterapkan karena tidak semua sidang itu mampu diselesaikan secepatnya karena diperlukan kajian yang lama. masyarakat biasanya meminta kepada hakim untuk sesegera mungkin untuk menyelesaikan perkaranya akan tetapi demi mewujudkan keadilan tentunya diperlukan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya. Sebagai hakim kami tidak bisa untuk mengambil keputusan dengan tergesa-gesa.”

Wawancara dilakukan dengan Slamet

“Asas cepat yaitu cepat menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dipengadilan agama. Dalam penyelesaian perkara hendaknya para hakim tidak telalu bertele-tele dalam mengambil keputusan tapi tidak melupakan kajian-kajian yang mendalam dari kasu-kasu yang ditangani, ketelitian kecermatan tentunya tidak boleh diabaikan.

Dalam prakteknya disidang keliling asas cepat merupakan hal yang sangat sulit untuk diterapkan oleh kami selaku hakim yang menangani perkara-perkara yang masuk khususnya perkara-perkara yang sulit diselesaikan serta memerlukan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Namun, kami selaku hakim selalu berupaya untuk secepat mungkin dalam menangani setiap perkara yang kami tangani.”

Wawancara dilakukan dengan Khoirul Huda

“Asas cepat yaitu tidak menghambat penyelesaian kasus-kasus yang sudah masuk dipengadilan agama. Menurut saya penyelesaian terbaik yaitu penyelesaian yang cepat tapi harus tetap cermat sehingga rasa keadilan tetap ditegakkan.

Dalam praktek ketika sidang keliling asas tersebut belum mampu menjangkau kepada semua perkara-perkara yang masuk ke sidang keliling, hanya kasus-kasus tertentu saja yang mana pihak hakim mampu menetapkan putusan secara cepat atau hanya memerlukan satu kali sidang saja. Saya sendiri menyadari bahwa menangani perkara itu tidak mudah akan tetapi saya tetap berharap kalau dalam penyelesaiannya pihak yang bersangkutan hendaknya cepat dalam mengambil keputusan.”

Wawancara dilakukan dengan Muhammad Hasan

“Asas cepat yaitu dalam pengambilan keputusan itu sesegera mungkin tidak memperlama dalam mengambil keputusan.

Menurut pengalaman saya ketika saya mendaftarkan perkara saya ke sidang keliling saya merasa hakim telah mengamil keputusan secara cepat karena hanya satu kali sidang. Pada waktu itu menangani kasus penetapan nikah. Namun ketika melihat perkara yang lain hakim tidak langsung memberikan putusan di waktu itu.”

Wawancara dilakukan dengan Abdullah

“Asas cepat yaitu cepat dalam mengambil keputusan

Ketika sidang keliling saya hanya satu kali sidang, jadi menurut saya para hakim telah menerapkan asas cepat dalam menyelesaikan perkara yang saya alami. Untuk perkara yang lain saya kurang mengetahuinya”.

Faktor lain yang berkaitan dengan efektifitas sidang keliling tersebut adalah waktu dan jarak. Keduanya patut diperhatikan, mengingat adanya ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama pasal 11 ayat (1), yang menyebutkan :

Pasal 11

- 1) Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.¹⁹

Lokasi sidang keliling yang diharuskan berada di tempat yang jauh dari Pengadilan Agama akan membuat proses persiapan dan pelaksanaannya memakan waktu yang lama. Lamanya waktu tersebut tentu hanya akan dirasakan oleh pihak

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*, Pasal 11.

pengadilan selaku pelaksana. Sementara masyarakat dan orang-orang yang ingin berperkara justru sebaliknya.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, tidak salah jika Akhmad Khoiron mengatakan bahwa pelaksanaan sidang keliling adalah merupakan suatu yang efektif bagi masyarakat, baik dalam hal dana, jarak dan waktu. Artinya, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sudah terpenuhi. Akan tetapi masih timbul permasalahan yang harus diperhatikan mengingat kenyataan bahwa pelaksanaan sidang keliling ternyata dirasakan cukup menyulitkan dan kurang efektif bagi pihak pengadilan.

